

Analisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Implementasi Sipkd di BPKPD Kota Sukabumi)

by Fatih Akbar

Submission date: 06-May-2024 01:38AM (UTC-0500)

Submission ID: 2372062332

File name: AKUNTANSI_45_Vol_5_No._1_Mei_2024_hal_223-237.pdf (579.41K)

Word count: 4555

Character count: 31331

**Analisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi
(Studi Kasus Implementasi Sipkd di BPKPD Kota Sukabumi)**

Fatih Akbar

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota
Sukabumi

Sakti Alamsyah

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota
Sukabumi

Gatot Wahyu Nugroho

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota
Sukabumi

Korespondensi Penulis: fatih083@ummi.ac.id

Abstrak. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Sukabumi merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi sistem tersebut di BPKPD Kota Sukabumi, mengevaluasi manfaatnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait di BPKPD Kota Sukabumi, observasi langsung terhadap proses implementasi sistem, dan analisis dokumen terkait laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi di BPKPD Kota Sukabumi telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem ini mampu mengintegrasikan transaksi keuangan, meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan, serta meminimalisir risiko kesalahan dan penyalahgunaan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi meliputi dukungan manajemen, pelatihan pegawai, infrastruktur teknologi yang memadai, dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan BPKPD Kota Sukabumi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Sistem Informasi Akuntansi di BPKPD Kota Sukabumi, sehingga dapat menjadi acuan bagi organisasi sejenis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Keywords: Implementation, Accounting Information Systems, Regional Financial and Asset Management Agency, Sukabumi City.

Kota Sukabumi merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi sistem tersebut di BPKPD Kota Sukabumi, mengevaluasi manfaatnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait di BPKPD Kota Sukabumi, observasi langsung terhadap proses implementasi sistem, dan analisis dokumen terkait laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi di BPKPD Kota Sukabumi telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem ini mampu mengintegrasikan transaksi keuangan, meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan, serta meminimalisir risiko kesalahan dan penyalahgunaan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi meliputi dukungan manajemen, pelatihan pegawai, infrastruktur teknologi yang memadai, dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan BPKPD Kota Sukabumi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Sistem Informasi Akuntansi di BPKPD Kota Sukabumi, sehingga dapat menjadi acuan bagi organisasi sejenis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kota Sukabumi.

Received Maret 31, 2024; Accepted Mei 06, 2024; Published Mei 31, 2024

* Fatih Akbar fatih083@ummi.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memberlakukan konsep otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. Menurut pasal tersebut, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengelola sendiri Urusan Pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) Pasal 280 ayat 1 juga menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah ketika menjalankan sebagian urusan Pemerintahan yang diberikan atau ditugaskan kepada mereka.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap aspek keuangan di wilayah daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dijalankan dengan tata tertib, efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah RI Nomor 12, 2019).

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang sedang berkembang dengan pesat. Perkembangan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun (2005) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah proses pelayanan publik, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pemerintah daerah memiliki potensi untuk menggunakan teknologi dan sistem informasi sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan mempermudah proses pengolahan data penerimaan pendapatan, pengeluaran, serta pembuatan laporan keuangan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan akurasi dan keandalan data keuangan yang dihasilkan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan salah satu sistem informasi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. SIA dapat dijelaskan sebagai sebuah rangkaian sub-sistem atau komponen, baik berupa elemen fisik maupun non-fisik, yang saling terhubung secara harmonis. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengolah data

keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai pihak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi (Puspitawati, 2021).

Dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka. Sistem ini memungkinkan pengolahan data keuangan secara efisien dan akurat, serta menyediakan informasi yang relevan dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Melalui integrasi sub-sistem dan komponen yang saling berhubungan, SIA memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan sistem informasi keuangan yang terpercaya dan berguna bagi berbagai pihak terkait.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi, pemerintah juga telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun (2005) mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data terkait pengelolaan keuangan daerah dan data lainnya. Sistem ini bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada masyarakat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah ini memastikan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini tidak hanya bertugas mencatat dan mengadministrasikan data keuangan, tetapi juga melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi masyarakat serta sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 76 Tahun (2020) yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tugas utama untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berhubungan dengan keuangan, sesuai dengan kewenangan Daerah. Salah satu tugas penting yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi adalah penyusunan laporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan. Hal ini

merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah, BPKPD Kota Sukabumi telah menerapkan sistem informasi akuntansi, di antaranya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPKD ini telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang ditemui. Berdasarkan pengamatan awal penulis, terdapat beberapa keterlambatan dalam penginputan data ke dalam aplikasi SIPKD dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masalah jaringan internet yang sering terjadi dan permasalahan pada server.

Meskipun penerapan aplikasi SIPKD sebagai Sistem Informasi Akuntansi sudah berjalan dengan semestinya, adanya keterlambatan dalam penginputan data menjadi salah satu kekurangan yang perlu diperhatikan. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan akurasi informasi keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, penting bagi BPKPD Kota Sukabumi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aplikasi SIPKD. Dalam hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan infrastruktur jaringan internet dan pemeliharaan rutin pada server, untuk memastikan kelancaran proses penginputan data ke dalam aplikasi.

Berdasarkan penelitian Zukhruf Fahril (2021), ditemukan bahwa dalam penerapan sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi SIMDA, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah belum adanya integrasi sistem secara online antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan aplikasi SIMDA. Selain itu, kurangnya keberadaan petunjuk teknis (SK) tentang tim pengelola SIMDA juga menjadi salah satu faktor kendala. Selanjutnya, sumber daya manusia yang menggunakan aplikasi SIMDA juga masih kurang handal.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi masih dihadapkan pada beberapa faktor kendala dan hambatan. Integrasi yang belum terlaksana secara online antara SKPD dan aplikasi SIMDA, ketiadaan SK yang mengatur tim pengelola SIMDA, serta kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam menggunakan aplikasi SIMDA merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam

meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar implementasi sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan optimal.

Menurut Musthofa Amin Khusaini (2022), terdapat permasalahan terkait rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas tersebut antara lain ketidakselarasan data antar komponen laporan keuangan, ketiddetelan laporan keuangan, adanya perbedaan output antara aplikasi dan kertas kerja manual, serta ketidaklengkapannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan, seperti relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Penerapan sistem informasi yang efektif akan membantu dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, memberikan informasi yang akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori Sistem

Menurut Lilis Puspitawati (2021, p. 17) Sistem merupakan suatu gabungan dari dua atau lebih sub sistem, komponen, atau serangkaian prosedur yang berinteraksi dan bekerja secara terpadu (terintegrasi) dengan tujuan mencapai suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tinjauan Teori Informasi

Menurut Elisabet Yunaeti Anggraeni (2017, p. 12) Informasi adalah hasil dari memproses data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan signifikan bagi penerima informasi tersebut. Informasi ini menggambarkan peristiwa nyata dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Sri Mulyani Nur, dkk (2018, p. 14), Informasi adalah hasil pengolahan data yang disiapkan untuk kepentingan individu, organisasi, atau siapa pun yang membutuhkannya.

Tinjauan Teori Akuntansi

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015, p. 3), Akuntansi melibatkan proses mencatat transaksi yang didukung oleh faktur, kemudian transaksi tersebut dijurnal, dicatat dalam buku besar, dan neraca lajur, dengan akhirnya menghasilkan informasi dalam bentuk laporan

keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan menurut Sri Wahyuni (2020, p. 7), Akuntansi adalah rangkaian konsep dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan informasi keuangan dalam suatu entitas bisnis.

Tinjauan Teori Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Lilis Puspitawati (2021, p. 3), Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang secara khusus mengolah data yang berasal dari transaksi keuangan dan transaksi terkait keuangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

Indikator Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Dalam penerapan sistem informasi akuntansi ada indikator untuk menilai kualitas sistem informasi akuntansi yang digunakan, menurut Heidmann, dkk dalam buku Lilis Puspitawati (2021, p. 67) menyimpulkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang atau dimensi yaitu: Penggunaan Sistem (*system use*) dan Kepuasan pengguna (*user satisfaction*) yang dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Dimensi penggunaan sistem (*system usage*) dengan indikator:
 - a) Keamanan (*Security*), mencakup pengendalian akses yang memastikan keamanan sistem saat diakses.
 - b) Integritas Pengolahan (*Processing Integrity*), menggambarkan sejauh mana sistem memfasilitasi penggabungan informasi dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan.
 - c) Ketersediaan (*Availability*), mengacu pada kemampuan sistem untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendukung pelaksanaan proses bisnis.
 - d) Kemudahan Penggunaan dan Kebermanfaatan (*Ease of Use and Usefulness*), merujuk pada sistem yang mudah digunakan dan memberikan manfaat yang diharapkan atau berguna.
2. Dimensi Kepuasan Pengguna (*user satisfaction*) dengan indikator:
 - a) Fleksibel (*Flexible*), menggambarkan sejauh mana sistem mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan pengguna dan perubahan lingkungan.
 - b) Aksesibilitas (*Accessible*), mencerminkan kemudahan dalam mengakses sistem informasi di mana pun dan kapan pun.
 - c) Efisien (*Efficient*), merujuk pada penggunaan biaya yang efektif, di mana manfaat informasi yang diberikan harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut.

- d) Menyediakan Informasi yang Benar dan Tepat Waktu (Provides Correct and Timely Information), mengindikasikan bahwa sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi Sistem Informasi Akuntansi di BPKPD Kota Sukabumi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara memberikan perspektif responden, observasi memberikan pemahaman langsung tentang proses implementasi, dan analisis dokumen mendukung temuan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman detail tentang implementasi Sistem Informasi Akuntansi di BPKPD Kota Sukabumi dan menyajikan temuan secara rinci dan naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Sistem Informasi Akuntansi di BPKPD Kota Sukabumi mengikuti indikator pengukuran yang dikemukakan oleh Heidmann, dkk dalam buku Lilis Puspitawati (2021, p. 67) Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dilihat dari dimensi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna yang diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Dimensi Penggunaan Sistem

a. *Security*

Keamanan merupakan prioritas utama dalam pengoperasian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Badan tersebut telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang efektif untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari berbagai ancaman dan serangan yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sumber daya sistem. Salah satu langkah keamanan yang diterapkan adalah penggunaan Virtual Private Network (VPN). Dengan menggunakan VPN, akses ke sistem informasi akuntansi dapat dilakukan secara aman dan terenkripsi, terutama saat pengguna melakukan akses dari luar jaringan internal. Hal ini memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima antara pengguna dan sistem tetap terlindungi dari ancaman potensial.

Selain itu, untuk mengontrol akses ke sistem, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi hanya memberikan username dan password kepada pegawai yang berwenang. Dengan adanya langkah ini, sistem hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki otoritas dan hak akses yang sesuai. Hal ini membantu mencegah akses yang tidak sah dan menjaga integritas data serta pengolahan yang dilakukan dalam sistem.

Dengan implementasi langkah-langkah keamanan yang efektif ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat mengatasi masalah dan kendala yang mungkin muncul terkait keamanan sistem. Langkah-langkah ini memastikan bahwa sistem informasi akuntansi berjalan dengan lancar dan dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sumber daya sistem. Selain itu, langkah-langkah keamanan ini juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pengguna dalam menggunakan SIA untuk keperluan pengelolaan keuangan daerah.

b. *Processing integrity*

Integrasi pemrosesan merupakan prinsip penting dalam pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Prinsip ini menekankan pada keandalan, ketepatan, dan kelengkapan proses pengolahan data yang terjadi dalam sistem tersebut. Dalam konteks pengimplementasian SIPKD, integrasi yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencerminkan efisiensi dan konsistensi dalam pemrosesan data. Integrasi pemrosesan terlihat dari proses penginputan data yang dilakukan oleh setiap SKPD. Dalam SIPKD, SKPD memiliki akses untuk menginput data yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Data yang diinput oleh SKPD tersebut akan terintegrasi secara otomatis ke dalam sistem, mengurangi kebutuhan akan pengolahan manual yang berpotensi memunculkan kesalahan dan inkonsistensi. Hal ini memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sistem adalah akurat dan terkini.

Integrasi juga terlihat dari konsolidasi data yang dilakukan dalam SIPKD. Data yang diinput oleh setiap SKPD akan diolah dan dikonsolidasikan menjadi informasi yang lebih komprehensif. Proses konsolidasi ini memungkinkan pengguna sistem, seperti manajer atau pengambil keputusan, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang keuangan daerah secara keseluruhan. Informasi yang dihasilkan melalui integrasi data ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Selain itu, integrasi pemrosesan juga

mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Dalam SIPKD, sistem secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi dari data yang telah diinput. Laporan keuangan tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Keandalan dan kelengkapan laporan keuangan ini didukung oleh integrasi yang baik antara data yang diinput oleh SKPD dan proses pemrosesan yang terjadi dalam sistem.

Dengan adanya integrasi pemrosesan yang baik dalam SIPKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat memperoleh manfaat yang signifikan. Integrasi yang efektif memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah akurat, up-to-date, dan lengkap. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membuat keputusan yang tepat, strategis, dan berkelanjutan.

c. *Availability*

Ketersediaan merupakan faktor kritis dalam Sistem Informasi Akuntansi seperti SIPKD yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Sistem tersebut harus siap digunakan dan dapat diakses oleh pengguna pada saat dibutuhkan. Dalam implementasinya, SIPKD telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan ketersediaan yang diinginkan. Ketersediaan SIPKD terkait dengan waktu operasional sistem. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara konsisten dan dapat memberikan layanan yang diharapkan kepada pengguna. Dalam hal ini, SIPKD telah menunjukkan kemampuannya untuk berfungsi dengan baik, memberikan akses yang cepat dan responsif kepada pengguna saat mereka membutuhkannya. Dengan kata lain, pengguna dapat mengakses SIPKD dan menggunakan fungsionalitasnya dengan lancar dan tanpa hambatan.

Ketersediaan SIPKD juga didukung oleh fleksibilitas akses yang dimilikinya. Dengan menggunakan username dan password yang diberikan kepada staf yang berwenang, mereka dapat mengakses SIPKD dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet. Dalam konteks penggunaan VPN (Virtual Private Network), SIPKD dapat diakses dengan aman dan terjamin keamanannya meskipun pengguna terhubung melalui jaringan yang tidak terlindungi. Hal ini memastikan bahwa sistem dapat tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkannya, baik di kantor maupun di luar kantor.

Dengan ketersediaan yang terjamin, SIPKD memungkinkan para staf dan pengguna terkait untuk mengakses dan menggunakan sistem saat diperlukan, sehingga mendukung kelancaran operasional dan proses pengelolaan keuangan daerah. Faktor ini sangat penting dalam menjaga kontinuitas dan efektivitas penggunaan SIPKD, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat mengoptimalkan manfaat dari sistem tersebut.

d. *Ease to use & usefulness*

Kemudahan dan kegunaan merupakan faktor penting dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. SIPKD dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam hal efisiensi dan kemudahan penggunaan. Dalam pengoperasiannya, SIPKD memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan berbagai tugas terkait pembuatan laporan keuangan. Antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah dipahami memudahkan pengguna untuk melakukan input data, pemrosesan data, dan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan. Fitur-fitur yang disediakan dalam SIPKD juga dirancang untuk memastikan bahwa proses pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan efisien dan akurat.

Selain kemudahan penggunaan, kegunaan SIPKD juga terlihat dari manfaat yang diberikan kepada pengguna. Dengan menggunakan SIPKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui SIPKD memberikan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Dengan demikian, penerapan SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi memberikan kemudahan penggunaan dan kegunaan yang relevan dalam membantu pembuatan laporan keuangan. Kemudahan penggunaan dan manfaat yang diberikan oleh SIPKD membantu pengguna untuk melaksanakan tugas mereka dengan efisien dan efektif, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

2. Dimensi Kepuasan Pengguna

a. *Flexible*

Fleksibilitas merupakan salah satu keunggulan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. SIPKD mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berbeda atau perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPKD dirancang dengan konfigurasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Penggunaan sistem ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam mengatur fungsionalitas sistem sesuai dengan persyaratan yang berubah atau variasi yang diinginkan.

Selain itu, dalam wawancara dengan narasumber, terungkap bahwa SIPKD masih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini. Kemampuan sistem ini untuk terus beradaptasi dengan perubahan regulasi, kebijakan, atau kebutuhan pengguna merupakan indikator fleksibilitas yang baik. Hal ini memberikan kepercayaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi bahwa SIPKD dapat terus mendukung kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dinamis.

Dengan adanya fleksibilitas dalam SIPKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat dengan mudah menyesuaikan sistem sesuai dengan perubahan yang terjadi. Fleksibilitas ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Badan tersebut dalam menghadapi dinamika dan tuntutan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

b. *Accessible*

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Aplikasi SIPKD ini didesain untuk memberikan kemudahan akses dan penggunaan bagi semua pengguna, tanpa memandang latar belakang pendidikan atau kemampuan mereka. Dalam konteks penggunaan SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, aksesibilitas sistem ini diperhatikan dengan serius. BPKPD menyadari pentingnya memberikan bimbingan teknis kepada pegawai terkait penggunaan SIPKD, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Melalui pengadaan bimbingan teknis, pegawai yang bertanggung

jawab dalam pengolahan laporan keuangan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan SIPKD.

Dengan adanya upaya ini, SIPKD menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Hal ini memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian dapat memanfaatkan sistem ini secara efektif dalam proses pengolahan dan pelaporan keuangan daerah. Dengan memperhatikan aksesibilitas dalam penggunaan SIPKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat memastikan bahwa sistem ini dapat diakses dan digunakan dengan setara oleh semua pengguna. Dengan demikian, SIPKD dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih inklusif dan memastikan bahwa semua pegawai memiliki akses ke alat yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efisiensi dan akurasi.

c. *Efficient*

Efisiensi merupakan aspek penting dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Aplikasi SIPKD ini dirancang untuk memberikan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Melalui penggunaan SIPKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercapai melalui penggunaan yang efektif dan efisien dari waktu, tenaga, anggaran, dan sumber daya lainnya yang terlibat dalam operasional sistem.

Seiring dengan berjalannya waktu, SIPKD terus mengalami perbaikan dan perubahan untuk meningkatkan efisiensinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, aplikasi ini dianggap efisien karena telah mencapai tingkat stabilitas yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa SIPKD dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, meminimalkan pemborosan waktu, energi, atau anggaran yang tidak perlu.

Dengan adanya efisiensi yang tercapai melalui penggunaan SIPKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak pada efektivitas kinerja organisasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi

pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

d. *Provides Correct and Timely Information*

Menyediakan informasi yang benar dan tepat waktu merupakan aspek kritis dalam pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Kemampuan sistem untuk menghasilkan informasi yang akurat, valid, dan relevan dalam waktu yang tepat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pihak yang berkepentingan.

SIPKD didesain untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan daerah dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Data yang dimasukkan ke dalam sistem harus diverifikasi dan divalidasi secara seksama untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Hal ini penting agar keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut dapat dipercaya dan menghasilkan dampak yang positif.

Dengan menyediakan informasi yang benar dan tepat waktu, SIPKD memberikan manfaat yang signifikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar informasi dalam pengambilan keputusan terkait keuangan daerah, perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja. Dengan memiliki akses ke informasi yang akurat dan relevan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan transparansi, dan memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan secara efektif.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi telah dinilai berdasarkan dimensi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Dalam dimensi penggunaan sistem, SIA ini memiliki keamanan yang baik dengan penggunaan VPN dan penggunaan username dan password yang terbatas kepada pegawai yang berwenang. Integrasi pemrosesan data juga berjalan dengan baik, terlihat dari proses penginputan dan konsolidasi data dari setiap SKPD ke SIA. Selain itu, SIA ini juga memberikan ketersediaan yang baik dengan memungkinkan akses menggunakan username dan password dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet dan

menggunakan VPN. Kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya SIA juga telah terpenuhi dalam membantu pembuatan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Dalam dimensi kepuasan pengguna, SIA ini tergolong fleksibel karena masih mampu menyesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda hingga saat ini. Aksesibilitasnya juga baik, dengan adanya fasilitasi bimbingan teknis bagi pegawai yang menggunakan SIA, sehingga pengguna dari berbagai latar belakang pendidikan dapat dengan mudah menjalankan sistem ini. Selain itu, SIA ini juga terbukti efisien karena telah mengalami perbaikan dan perubahan dari tahun ke tahun, serta hasil wawancara narasumber menyebutkan bahwa aplikasi ini sudah stabil. Yang terakhir, SIA ini juga mampu menyediakan informasi yang benar dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran untuk meningkatkan kualitas SIA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi adalah:

1. Memastikan keamanan sistem informasi akuntansi tetap terjaga dengan terus memperbarui metode keamanan dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
2. Mengoptimalkan integrasi pemrosesan data untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi yang dihasilkan.
3. Memperhatikan ketersediaan sistem agar pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah dan tanpa gangguan, termasuk meningkatkan kecepatan akses dan stabilitas jaringan.
4. Terus memperbaiki antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai latar belakang pendidikan.
5. Melakukan evaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan dan peningkatan dalam sistem SIA, sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan pengguna.
6. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan teknis bagi pengguna SIA untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan sistem dengan optimal.
7. Terus meningkatkan efisiensi sistem dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang optimal dalam pengolahan data keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. Y., Risanto, E., Basuki, Y., Nofianto, D., C, A. A., & Offset, A. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Fahri, Z., & Nasution, J. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Bagian Umum*

Kantor Walikota Medan.

- Mulyani, S., Suzan, L., Sagara, Y., Yuniarti K., E., Dwi Karya S., C., Nur Azizah K., Z., & Alam M., M. (2018). Sistem Informasi Akuntansi : Aplikasi Di Sektor Publik. Unpad Press.
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puspitawati, L. (2021). Sistem Informasi Akuntansi : Kualitas Dan Faktor Lingkungan Organisasi Yang Mempengaruhi. Rekayasa Sains.
- Sri Wahyuni Nur, S. E. M. A. (2020). Akuntansi Dasar: Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Cendekia Publisher.
- Sujarweni, V. W. (2015). Sistem Akuntansi (Mona, Ed.; 1st ed.). Pustaka Baru Press.
- Undang-undang RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. In Undang-Undang (Issues 1–311, pp. 1–311).

Analisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Implementasi Sipkd di BPKPD Kota Sukabumi)

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ repository.uinsu.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Analisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Implementasi Sipkd di BPKPD Kota Sukabumi)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
